

**Mitigasi Bencana I Alat Peringatan Tsunami Dikhawatirkan Rusak
48 Desa Pesisir Siaga Tsunami**

PACITAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengembangkan 48 kawasan pantai rawan bencana tsunami di seluruh Indonesia menjadi Desa Pesisir Tangguh. Langkah ini menciptakan desa yang siaga dan siap menghadapi gempa dan tsunami.

"Pengembangan program desa pesisir tangguh ini diprioritaskan di daerah-daerah yang dinilai rawan bencana, khususnya gempa dan tsunami," kata Direktur Pesisir dan Kelautan KKP Soebandono Diposaptono di Pacitan, Minggu, (15/1).

Penilaian atau evaluasi atas desa-desa di kawasan pesisir pantai yang dinyatakan sebagai daerah berkategori rawan bencana gempa dan tsunami itu sendiri telah dilakukan selama kurun tahun 2011. Hasilnya, 48 desa ditetapkan untuk dijadikan percontohan program Desa Pesisir Tangguh.

"Ke-48 desa itu tersebar di berbagai provinsi, mulai dari Jatim, Yogyakarta, Banten, dan beberapa daerah di Pulau Sumatra. Saya tidak hafal jika diminta menyebut nama daerahnya satu per satu, yang pasti desa-desa itu berada di 16 kabupaten/kota," urainya.

Soebandono menjelaskan penunjukan atau penetapan Desa Pesisir Tangguh sengaja dikonsentrasikan di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Perairan yang berada di antara lempeng benua Eurasia dan Indo Australia itu dikenal rawan gempa bumi serta tsunami karena fenomena tumbukan yang terjadi antarbatuan kerak bumi tersebut.

Soebandono menambahkan ada lima hal dalam program Desa Pesisir Tangguh yang akan mereka laksanakan, yakni bina manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan siaga bencana. Untuk siaga bencana, lanjut dia, diharapkan di tingkat-tingkat desa segera dibentuk tim sehingga kesiapsiagaan ketika menghadapi bencana telah matang.

Selain menggelar program Desa Pesisir Tangguh, KKP juga terus mengembangkan kawasan hutan pantai. Tujuannya hampir sama, yaitu melindungi wilayah permukiman ketika terjadi gelombang tsunami. Sementara itu, Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas II Pulau Baai BMKG Provinsi Bengkulu Sudyanto mengatakan Kota Bengkulu membutuhkan minimal sepuluh unit menara pemantau peringatan dini tsunami karena daerah ini sebagian besar penduduknya berada di kawasan pantai.

Tower pemantau tsunami di Kota Bengkulu, hingga saat ini, baru ada dua unit. yaitu terletak di kantor gubernur dan sport centre Pantai Panjang, "Idealnya untuk menjangkau seluruh Kota Bengkulu dibutuhkan sepuluh unit karena wilayah pesisir Kota Bengkulu banyak ditempati permukiman penduduk, antara lain Kelurahan Lempuing dan Pasar Bengkulu," katanya.

Ia mengatakan selain kesiapan menara peringatan dini tsunami, juga kesiapsiagaan masyarakat harus terus ditingkatkan di setiap kelurahan, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan pesisir pantai. Menyinggung kondisi peralatan peringatan dini yang dibagikan ke beberapa kelurahan oleh Pemprov Bengkulu, beberapa tahun lalu, ia mengatakan tetap dipantau keberadaan dan lokasi penempatan alat tersebut.

Seorang warga Sumur Melele, Haryanto, mengatakan hingga saat ini warga tidak mengetahui keberadaan peralatan peringatan tsunami tersebut, padahal informasinya pernah dibagikan pemerintah daerah, antara lain genset, sirine, dan lampu emergency. "Saya tidak pernah lihat lagi di mana peralatan itu, jangan-jangan sudah rusak karena jarang dipakai," katanya.

Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat lebih tanggap, tidak hanya pada saat ada bencana, tapi pada penyiapan pengetahuan dan informasi tentang kesiapsiagaan. "Dulu pernah ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, tapi sekarang sudah lama tidak dilakukan lagi," ujarnya.

